



# **VISI KEBANGSAAN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ DALAM PARADIGMA KEILMUAN UIN KHAS JEMBER**



Pengantar Ketua Umum PBNU  
**Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.**

Pengantar Rektor  
**Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.**

Prolog:  
**Dr. Wildani Hefni, MA.**

Epilog:  
**Prof. Dr. Achmad Syahid, MA.**

**VISI KEBANGSAAN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
DALAM PARADIGMA KEILMUAN UIN KHAS  
JEMBER**



# **VISI KEBANGSAAN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ DALAM PARADIGMA KEILMUAN UIN KHAS JEMBER**



Pengantar Ketua Umum PBNU  
**Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.**

Pengantar Rektor  
**Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.**

Prolog:  
**Dr. Wildani Hefni, MA.**

Epilog:  
**Prof. Dr. Achmad Syahid, MA.**

Copyright ©2021, Bildung  
*All rights reserved*

**VISI KEBANGSAAN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ DALAM PARADIGMA  
KEILMUAN UIN KHAS JEMBER**

Wildani Hefni, dkk.

**Kata Pengantar:**

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. (Ketua Umum PBNU)

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. (Rektor)

**Prolog:** Dr. Wildani Hefni, MA.

**Epilog:** Prof. Dr. Achmad Syahid, MA.

**Editor:** Wildani Hefni

**Desain Sampul:** Ruhtata

**Layout/tata letak Isi:** Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Visi Kebangsaan Kiai Haji Achmad Siddiq dalam Paradigma Keilmuan UIN  
KHAS Jember/Wildani Hefni, dkk./Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021

xxxiv + 458 halaman; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-6379-14-1

Cetakan Pertama: Agustus 2021

Penerbit:

**BILDUNG**

Jl. Raya Pleret KM 2

Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791

Email: [bildungpustakautama@gmail.com](mailto:bildungpustakautama@gmail.com)

Website: [www.penerbitbildung.com](http://www.penerbitbildung.com)

Anggota IKAPI

Bekerjasama dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari  
Penerbit dan Penulis

# **CULTIVATING UKHUWWAH DALAM MENEGUHKAN FAHAM KEBANGSAAN DI INDONESIA: GAGASAN BRILLIANT K.H. ACHMAD SIDDIQ DALAM MENGAWAL NKRI DAN PANCASILA**

**Syamsun Ni'am**

Dosen STAIN/IAIN Jember 2000-2015 & Dosen/Guru Besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2015-sekarang

## **Pendahuluan**

ARTIKEL ini sengaja ditulis karena adanya beberapa pertimbangan mendasar, antara lain: *Pertama*, sedemikian dinamis dan cepatnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial (medsos) seakan membawa pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, bahkan tidak jarang mengalienasi tuntutan-tuntutan Nurani manusia itu sendiri sebagai makhluk yang memerlukan jalinan komunikasi secara wajar, normal, dan manusiawi. Hal yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya adalah hubungan persaudaraan (*ukhuwwah*) yang menjadi sesuatu yang langka dalam konteks hubungan antar sesama manusia saat ini, baik hubungan antar keluarga, saudara, sahabat, guru-murid, kyai-santri, dan berbagai jalinan komunitas di tengah-tengah masyarakat. Sebagai akibatnya, munculnya gaya dan pola hidup yang serba praktis-pragmatis, materialistis, dan individualistis, yang membawa kepada hilangnya jatidiri manusia sebagai makhluk –secrea sosial— yang mestinya harus dapat berhubungan secara normal, natural, wajar dan manusiawi. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari alasan pertama di atas, sudah bukan menjadi rahasia lagi, jika munculnya tradisi/budaya yang sulit ditemukan dalam kehidupan sebelumnya, yaitu cueknya para pihak di kalangan remaja dan orang dewasa tidak lagi mengindahkan norma-norma hubungan antar

individu, tidak lagi adanya saling sapa antar saudara, antar sanak dan kerabat, antara yang muda dengan yang lebih tua (atau sebaliknya), antara guru dan murid, dan seterusnya. Hal itu disebabkan karena sibuknya mereka dengan *gadget* (perangkat yang berbasis android), sehingga waktunya seakan habis hanya untuk melayani *gadget* yang sedang dimainkan. *Ketiga*, ditemukan beberapa hasil *survey* yang menyatakan tentang pupus/lunturnya rasa nasionalisme di kalangan para pemuda Indonesia di usia produktif.<sup>1</sup> Hal itu akan berpengaruh dalam dinamika kebangsaan Indonesia di masa-masa mendatang. Implikasi nyata dari kondisi tersebut, adalah munculnya ketidakpahaman tentang konsep dan praktek kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang bersendikan ideologi Pancasila. Padahal basis berkebangsaan yang ber-ideologikan Pancasila dianggap sebagai pilihan final untuk menata dan merawat bangsa Indonesia yang sangat multikultural dan bhinneka ini di masa saat ini dan mendatang.

*Keempat*, gayut bersambut dari pertimbangan pertama, kedua, dan ketiga di atas, *ukhuwwah* (persaudaraan) seakan menjadi sesuatu yang langka di tengah arus informasi yang sedemikian dinamis dan cepat, sehingga media sosial menjadi instrumen utama dalam berkomunikasi yang berakibat kepada teralenasinya desain berkebangsaan dan ber-ideologi secara bertanggungjawab yang mestinya berbasis pada nurani itu sendiri. Indikator kuat pupusnya jalinan persaudaraan di antara warga bangsa (*ukhuwwah basyariyah* dan *wathaniyah*), ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan serius tentang adanya wabah (pandemic) Covid-19 yang hingga kini tidak kunjung reda, bahkan cenderung naik. Pada saat ini seluruh komponen anak bangsa mestinya bisa hadir untuk

---

<sup>1</sup> Terkait dengan pernyataan tersebut, walaupun tidak secara langsung menunjuk pada kasus lunturnya pemahaman kebangsaan (nasionalisme) di kalangan anak muda, namun hasil *survey* yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada Agustus-Oktober 2016, menunjukkan mayoritas kaum muda (94,1%) masih menempatkan faham “kebhinnekaan” menjadi faktor kunci bangsa ini sebagai alat pemersatu bangsa. Lihat Syamsun Niam, “Re-Orientasi Kajian Islam dalam Mengurai Benang Kusut Kebhinnekaan di Indonesia”, *Naskah Pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Metodologi Studi Islam*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 05 November 2021), h. 16-17. *Survey* tersebut menunjukkan bahwa di kalangan kaum muda masih menempatkan faham kebhinnekaan sebagai karakteristik bangsa Indonesia yang tetap relevan untuk dipelihara dan dikembangkan hingga masa-masa mendatang.

bersama-sama berjuang dan saling bahu-membahu membebaskan diri dari bahaya virus Covid-19 tersebut, tapi yang terjadi justru sebaliknya, sebagian masyarakat Indonesia cuek, hilang rasa empati dan simpati antar sesama, sehingga jalinan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa seakan sudah tereduksi. *Kelima*, pada dekade mutakhir ini Indonesia sedang dihadapkan pada problem berkebangsaan yang kontras dengan yang selama ini dipegangi dan dipedomani selama puluhan tahun, yaitu munculnya gerakan yang berupaya untuk mengutak-atik bahkan sudah cenderung pada upaya merubahnya dengan ideologi lain seperti yang terus dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beserta komponen pendukungnya dengan jargon “khilafah”. Walaupun akhirnya dapat dipatahkan oleh negara melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 02 Tahun 2017 tentang organisasi massa yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.<sup>2</sup> Langkah tegas Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan mengeluarkan Perpu tersebut patut mendapat apresiasi, karena telah menyelamatkan ideologi Pancasila. Hal itu sekaligus menjadi antitesa terhadap berbagai paham yang kontras dengan paradigma berkebangsaan Indonesia, yang selama ini sudah dipilih dan disepakati oleh seluruh komponen bangsa melalui *jihad* dan *ijtihad* para pendiri bangsa Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-ideologi Pancasila.

Dalam konteks ini, Kyai Achmad Siddiq (selanjutnya disebut dengan Kyai Achmad) adalah seorang ulama yang hidup pada zamannya yang sudah barang tentu tidak sama dengan zaman saat ini dan mendatang, namun gagasan-gagasannya masih tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi yang hidup pada zaman setelahnya. Di antara gagasan *genuine* yang pernah dibangun oleh Kyai Achmad adalah tentang urgensi “*ukhuwwah* (persaudaraan)” yang menurutnya membawa implikasi serius dalam memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep *ukhuwwah* (persaudaraan) yang dikembangkan Kyai Achmad adalah

---

<sup>2</sup> Syamsun Ni'am, Imam Fuadi, Muhammad Ridho, *Pancasila Vis a Vis Islam: Pandangan Tokoh Muslim terhadap Upaya De-Ideologisasi Pancasila dan Implikasinya dalam Kehidupan Kebangsaan di Indonesia*, (Yogyakarta & Tulungagung: Kurnia Kalam Semesta & IAIN Tulungagung, 2018), h. 2.



“*ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan antar sesama ummat Muslim), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan antar sesama warga bangsa), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan antar sesama manusia)”. Ketiga *ukhuwwah* tersebut kemudian dikenal dengan “**Trilogi Ukhuwwah**”, yang dapat membawa implikasi mendasar dalam tata pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ber-ideologikan Pancasila.

Tulisan ini menemukan momentumnya di saat bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada disintegrasi pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan (*ukhuwwah*) dalam wadah NKRI. Kontribusi besar Kyai Achmad yang lainnya adalah tentang peneguhan kembali akan pentingnya menjaga ideologi Pancasila dari rongrongan pihak luar —baik secara nyata maupun laten— untuk merubah atau menggantinya. Menurut Kyai Achmad, Pancasila adalah ideologi dalam bernegara, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keduanya bisa saling mengisi dan berjalan bersama. Oleh karenanya tidak perlu dipertentangkan antar keduanya. Konsensus para pendiri bangsa —termasuk para ulama di dalamnya— dalam memilih Pancasila sebagai *common platform* menjadi bukti otentik bahwa keduanya bisa saling bertemu. Konsensus ini kemudian dianggap final dan mengikat semua komponen bangsa Indonesia. Kalau kemudian muncul sebagian dari komponen bangsa ini yang ingin mengutak-atik keberadaan Pancasila sebagai ideologi yang harus diganti atau dirubah dengan ideologi lainnya, maka hal itu sama saja melakukan upaya pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri.

## Biografi Singkat K.h. Achmad Siddiq

K.H. Achmad Siddiq, yang mempunyai nama kecil Achmad Muhammad Hasan, adalah lahir di Jember pada hari Ahad Legi, 10 Rajab 1344 (24 Januari 1926). Atau tujuh hari sebelum kelahiran Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir 31 Januari 1926, dan meninggal dunia pada hari Rabu, 23 Januari 1991 (7 Rajab 1411) di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.<sup>3</sup> Ia adalah putra bungsu Kyai

<sup>3</sup> “Kyai Achmad”, dalam *AULA: Risalah NU*, (Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991), No. 02, Tahun XIII, h. 11.

Muhammad Siddiq dari istri keduanya, Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam) binti K.H. Yusuf.<sup>4</sup>

Kyai Achmad adalah putra ke-25, anak bungsu dari K.H. Muhammad Siddiq, pendiri Pondok Pesantren Islam “*As-Siddiqi Putra (Ashtra)*”. Diceritakan, bahwa K.H. Muhammad Siddiq pernah lima kali menikah, masing-masing dengan Nyai Masmunah, Nyai Siti Aminah, Nyai Siti Zakiah (biasa disebut Nyai Maryam), Nyai Mardliyah, dan Nyai Siti fatimah. Dari dua istri (Nyai Siti Aminah dan Nyai Siti fatimah) tidak dikaruniai keturunan, sedangkan dari ketiga istri yang lain dikaruniai 25 anak putra-putri, namun yang hidup hingga dewasa sebanyak 10 orang.<sup>5</sup> Salah satunya adalah K.H. Achmad Siddiq.

Proses intelektualitasnya, Kyai Achmad dibesarkan dan diasuh oleh K.H. Mahfudz Siddiq, kakak kandungnya sendiri. Dari sinilah Kyai Achmad banyak mewarisi sifat dan karakter kakak kandungnya itu. Kyai Achmad memiliki watak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Wawasan berfikirnya amat luas, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum.

Dalam membentuk kepribadiannya, sedikitnya ada lima orang yang banyak mempengaruhi jalan hidupnya, yaitu K.H. Muhammad Siddiq, ayahandanya sendiri; K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri NU dan pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang; K.H. Wahid Hasyim; K.H. Mahfudz Siddiq, kakaknya sendiri yang pernah menjabat ketua PBNU di zaman Jepang; dan K.H. Abdul Hamid

<sup>4</sup> Hairus Salim HS. dan Ridwan Fakla AS. (selanjutnya disebut Salim) “K.H. Achmad Siddiq: Pemikiran Keagamaan dan Kenegaraannya”, dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS. (Ed.), *Biografi 5 Ra’is ‘Am Nahdlatul Ulama: K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syansuri, K.H. Ali Ma’shum, dan K.H. Achmad Siddiq*, (Yogyakarta: LTN-NU-Pustaka Pelajar, 1995), Cet. I, h. 141; Lihat juga Huda, *Biografi Mbah Siddiq*, h. 179.

<sup>5</sup> Lihat Abdul Halim Soebahar (Selanjutnya disebut Soebahar), “Arsitek Pemikiran Islam Indonesia (Catatan Biografi K.H. Achmad Siddiq)” dalam *Penelitian*, (Jember: Juli 2001), h. 11. Ada juga yang mengatakan bahwa K.H. Muhammad Siddiq pernah menikah tiga kali, masing-masing istrinya adalah Nyai Masmunah, Nyai Maryam, dan Nyai Mardliyah. Dari ketiga istri ini menurunkan 27 anak, namun yang sampai pada usia dewasa hanya 10 orang. Lihat “Kyai Achmad”, dalam *AULA: Risalah NU*, (Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991), h. 10. Juga Salim, “K.H. Achmad Siddiq, h. 141; Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS., (Ed.) (selanjutnya disebut Noeh), *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta: eLSAKU-Logos, 1999), Cet. I, h. 31-32.

Pasuruan. Di samping itu, ada tokoh lain yang tidak dipublikasikan tetapi sangat berpengaruh bagi kehidupan Kyai Achmad, mereka adalah K.H. Hamim Djazuli (dikenal dengan Gus Miek), seorang tokoh sema'an al-Qur'an, putra K.H. A. Djazuli Utsman Ploso Kediri, dikenal juga tokoh ulama kontroversial; dan Ir. Soekarno, presiden pertama RI.<sup>6</sup>

Kyai Achmad pada awalnya belajar mengaji kepada Abah (ayah) nya sendiri, Kyai Siddiq. Kyai Siddiq dalam mendidik terkenal sangat ketat, terutama dalam hal shalat. Beliau selalu mewajibkan kepada putra-putranya shalat berjama'ah 5 waktu. Selain mengaji kepada abahnya, Kyai Achmad juga banyak menimba ilmu dari kakaknya, yaitu Kyai Mahfudz, terutama dalam penguasaan kitab kuning. Sebagaimana lazimnya putra kyai, pendidikan Kyai Achmad diserahkan kepada kyai-kyai masyhur yang mempunyai pesantren. Kyai Mahfudz yang mengasuhnya, selepas menjalani pendidikan Sekolah Dasar, Kyai Achmad dikirim ke pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.<sup>7</sup>

Pendidikan formal Kyai Achmad dimulai dengan Sekolah Rakyat Islam (SRI), setelah tamat langsung melanjutkan studinya di beberapa pesantren besar di Jawa Timur, termasuk di pesantren as-Siddiqi Putra Jember yang diasuh oleh ayahnya sendiri. Kemudian pendidikan terakhir ia belajar pada pesantren Tebuireng Jombang. Di pesantren ini semula ada dua madrasah, yaitu Madrasah Nidzamiyah dan Madrasah Salafiyah. Sekitar tahun 1938 Kyai Achmad masuk, dan setelah melalui testing, ia langsung ditempatkan pada kelas IV di Madrasah Nidzamiyah, yang kemudian dihapus dan disatukan dengan Madrasah Salafiyah.

Di pesantren Tebuireng, Kyai Achmad belajar kitab-kitab agama pada Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, antara lain *Tuhfat al-Athfal*, *Fath al-Qarib* (pada tingkat dasar), *Tahrir*, *Fath al-Mu'in* (fiqh), *Alfiyah ibn Malik* (ilmu bahasa Arab), *Arudl wa al-Qawafi* (sastra), *Jawahir al-Kalamiyah* (teologi), *Waraqat* (ushul

<sup>6</sup> Lihat Soebahar, "Arsitek Pemikiran Islam", h. 21.

<sup>7</sup> Afton Ilman Huda, *Biografi Mbah Siddiq*, (Jember: Pon. Pes. Al-Fattah, tt.), h. 180; Noeh, *Menghidupkan Ruh*, h. 36.

fiqh), *‘Ilm al-Falak, Mizan al-Qawim, ‘Uqud al-Juman* (sastra), serta *Tafsir al-Baidlawi* dan *Ihya’ ‘Ulum ad-Din*.<sup>8</sup>

Pada saat K.H. A. Wahid Hasyim (Gus Wahid) memegang jabatan Ketua MIAI, Ketua NU dan Menteri Agama, Kyai Achmad dipercaya menjadi sekretaris pribadinya. Bagi Kyai Achmad sendiri, apa yang didapatnya dari Gus Wahid, selain pemikiran tentang K.H. Hasyim Asy’ari, juga ilmu dan bimbingan Gus Wahid sebagai bahan renungan mendalam dan ilmu yang sangat bermanfaat.<sup>9</sup> Pengalamannya secara langsung berguru kepada Gus Wahid amat sistimewa, karena tak semua santri dapat merasakannya, sehingga di kemudian hari, semasa menjadi Rais ‘Am PBNU, Kyai Achmad bisa cocok berduet dengan Ketua Tanfidziyah, K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur). Sejak tahun 1977, ia kembali ke kota kelahirannya, Jember dan memimpin Pesantren As-Siddiqi yang dimulai tahun 1977 hingga meninggal dunia tahun 1991. Tepatnya tanggal 23 Januari 1991, Kyai Achmad menghadap Sang Khaliq. Kyai Achmad wafat tepat sehari sebelum hari kelahirannya.<sup>10</sup>

## Islam Vis A Vis Negara

K.H. Achmad dikenal sebagai ulama kharismatik NU (Nahdlatul Ulama) yang luwes dan pandai bergaul dengan berbagai kalangan, sehingga Kyai Achmad memiliki banyak kawan. Modal inilah yang kemudian dalam perjalanan kehidupannya dapat mempertemukannya dengan penguasa, pengusaha, masyarakat biasa, tokoh-tokoh nasionalis, bahkan dengan ulama yang berseberangan pandangan sekalipun, hingga dengan tokoh lintas agama, suku, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Kyai Achmad kemudian dikenal sebagai sosok ulama populis NU. Mujamil Qomar dalam penelitiannya tentang 9 tokoh NU yang dianggap ulama yang memiliki tingkat progressifitas. Kyai Achmad dikategorikan sebagai ulama yang memiliki tipologi responsif, yaitu ulama yang memiliki

<sup>8</sup> Salim, "K.H. Achmad Siddiq", 145; Mujamil Qomar, *NU "Liberal": dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. 1, h. 154; dan *Jawa Pos*, 25 Januari 1991.

<sup>9</sup> Mujamil, *NU "Liberal"*, h. 154; *Jawa Pos*, 25 Januari 1991.

<sup>10</sup> Lihat Noeh, *Menghidupkan Ruh*, h. 43-44. Lihat juga *AULA*, Risalah NU, (Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991), No. 02, h. 13-16.

pemikiran yang condong memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat. Ciri dari tipologi responsif adalah cepat tanggap, suka merespons, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi.<sup>11</sup>

Di tahun 1980-an terjadi perdebatan sengit tentang diskursus Pancasila yang akan dijadikan sebagai azas tunggal oleh Pemerintah Orde Baru (era-Soeharto). Di saat perdebatan sengit tidak menemukan titik temu di kalangan tokoh bangsa Indonesia, Kyai Achmad tampil sebagai sosok ulama yang berintegritas dan otoritatif dalam menjelaskan hubungan Islam dan Pancasila. Kyai Achmad dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia dalam memantapkan peran dan pengaruhnya untuk memperjuangkan penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* di Indonesia di saat umat Islam merasa curiga terhadap rencana pemerintah Orde Baru menerapkan azas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial dan politik tersebut.<sup>12</sup> Kyai Achmad tampil memukau di setiap pertemuan baik seminar, simposium, hingga lokakarya, dengan argumentasi yang apik. Kyai Achmad tampak sebagai sosok ulama yang memiliki kewibawaan sempurna dalam menjelaskan hubungan Islam dan negara (baca: Pancasila), tentu argumennya tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pertimbangan keagamaan —dengan menggunakan metodologi berfikir *fiqh (ushul fiqh)*—, spiritualitas, diramu dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Kepiawaian Kyai Achmad dalam menjelaskan ajaran agama yang *incontext* dengan konsep kebangsaan, menjadikan NU (Nahdlatul Ulama) yang awalnya ragu dan bimbang untuk menerima Pancasila sebagai azas dalam berorganisasi, berhasil diyakinkan oleh Kyai Achmad, sehingga NU untuk pertamakalinya dapat menerima Pancasila secara tegas sebagai azas dalam berorganisasi, yang kemudian diikuti oleh organisasi keagamaan lainnya yang pada awalnya juga ragu dan bimbang dalam menerima Pancasila sebagai azas tunggal.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Mujamil Qomar, *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 260.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Niam dkk., *Pancasila Vis a Vis Islam*, h. 80-81.

Argumen mendasar yang melandasi pemikiran Kyai Achmad tentang “penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia” adalah: *pertama*, keterlibatan kaum Muslimin Indonesia, melalui para pemimpinya berperan aktif dalam merumuskan dan menetapkan, sehingga menjadi Undang-Undang Dasar Negara ini; dan *kedua*, prinsip dasar yang terkandung di dalam Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yang kemudian menjadi Dasar Negara, dapat dipertemukan dan dibenarkan menurut Islam. Dalam hal inilah seluruh komponen bangsa Indonesia –termasuk kaum Muslimin Indonesia— memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan bersama itu”.<sup>14</sup>

Kyai Achmad melihat, bahwa hubungan agama dan dan negara (baca: Pancasila), keduanya dapat berjalan beriringan, saling mengisi, menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan, keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lainnya. Pemerintah Orde Baru dengan menetapkan Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan kebangsaan Indonesia –menurut Kyai Achmad— dianggap sebagai langkah bijaksana, tidak hanya karena hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa ini, namun juga Pemerintah memiliki prinsip bahwa “Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan”.<sup>15</sup> Walaupun dalam realitas implementasinya memang tidak semudah membalikkan tangan.<sup>16</sup> Hal itu terbukti saat Pancasila dimonotafsirkan oleh Pemerintah Orde Baru masa Soeharto. Selama Orde Baru seakan Pancasila

<sup>14</sup> Lihat K.H. Achmad Siddiq, “Hubungan Agama dan Pancasila”, dalam *Makalah untuk Pertemuan Ilmiah “Peranan Agama dalam Memantapkan Ideologi Negara”* yang diselenggarakan oleh Balitbang Agama Departemen Agama RI. di Jakarta, 14-15 Maret 1985, h. 12; Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS. (Ed.), *Biografi 5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama’*, (Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, 1995), Cet. 1, h. 173-174.

<sup>15</sup> Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, h. 14.

<sup>16</sup> Perbincangan perihal hubungan Islam dan Negara sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar negaranya. Perdebatan sengit sebagaimana disinggung di atas adalah menyangkut bentuk ideologi Negara apakah yang paling cocok dengan konteks Indonesia. Disinilah kemudian memunculkan perdebatan yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Terkait hal ini sebagai bahan perbandingan, dapat dibaca pada Cecep Supriadi yang mengulas “Relasi Islam dan Negara: Wacana Islam dan Keindonesiaan”, dalam *Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.

menjadi mono tafsir, dan lainnya dianggap tidak berhak menafsirkan Pancasila, sehingga demokrasi Pancasila saat itu dianggap sebagai pepesan kosong dan terpasung oleh sebuah rezim Orde Baru, atas nama Pancasila, apapun tafsir dan tindakan warganya yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah saat itu, dianggap sebuah penyimpangan dan pelanggaran. Tidak jarang tindakan demikian dianggap sebagai perilaku subversif (makar), yang dapat berurusan dengan hukum versi Pemerintah.

Kembali kepada pandangan Kyai Achmad untuk memperkuat argumentasinya dalam memandang hubungan Islam dan negara dalam wadah NKRI, Kyai Achmad menyatakan: “Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini adalah bagaimana memproporsionalisasikan (*wadl’u syai’ fi mahallih*) Pancasila dan agama, sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat berpancasila ini agama dapat diamankan dengan lebih baik, dan sebaliknya, umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila.<sup>17</sup> Pandangan Kyai Achmad tersebut kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo tahun 1983. Hasil Munas NU tersebut menyatakan bahwa penerimaan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syari’ah, dan akhlaq Islam *Ahlussunnah wal Jama’ah*, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syari’at Islam ala *Ahlussunnah wal Jama’ah* itu sendiri.<sup>18</sup> Implikasinya bahwa seluruh pihak—khususnya warga NU—wajib memahami dan mengamalkan Pancasila secara murni, jujur, bertanggungjawab, dan konsekuen. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi lagi untuk mendirikan Negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah terartikulasikan di dalam Pancasila.<sup>19</sup> Dengan kata lain, siapa pun yang menolak, mengusik, dan/

<sup>17</sup> Qomar, *NU “Liberal”*, h. 261. Baca juga pada Syamsun Ni’am dan Anin Nurhayati, “Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya dalam Memantapkan Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia”, *AKDEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vo. 23, No. 02, Juli-Desember 2018, h. 249.

<sup>18</sup> Ni’am dkk., *Pancasila Vis a Vis Islam*, h. 82; Syamsun Ni’am & Anin Nurhayati, *Tasawuf Kebhinnekaan Perspektif Sufi Nusantara*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), h. 164.

<sup>19</sup> Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*, (Jakarta: LTN NU, 2014), h. 132-133.

mengganti Pancasila dengan ideologi lain –yang belum tentu cocok dengan karakter Indonesia--, maka oleh NU dianggap sebagai pengkhianatan yang serius. Atas dasar itu, organisasi NU hingga kini dianggap sebagai kelompok yang paling konsisten mengawal dan mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia.

Argumen Kyai Achmad tersebut telah berhasil meyakinkan seluruh ulama NU dalam Munas (Musyawarah Nasional) tersebut. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan. *Pertama*, tidak ditemukan satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan sila-silanya selaras dengan pokok-pokok ajaran Islam.<sup>20</sup> *Kedua*, dari sudut realitas politik, Pancasila ini dapat menjadi payung politik yang menyatukan seluruh warga bangsa yang sangat plural, baik etnis, suku, dan agama. Para kyai/ulama menyadari bahwa jika al-Qur'an dan al-Hadis dipaksakan sebagai asas dan konstitusi Negara Indonesia, maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik yang tiada henti. Dengan mendasarkan kepada kaidah ushul fiqh, "*dar' al-mafasid muqaddamun ala jalb al-manafi*", (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan)", maka para kyai/ulama NU tidak ragu menerima Pancasila sebagai asas dalam bernegara dan bukan asas dalam beragama (Islam).<sup>21</sup>

Kyai Achmad memang dikenal sebagai ulama kontemporer NU yang brilliant dalam memberikan argumentasi, dengan analisis yang tajam, rasional, empiris dan religius. Tidak sedikit yang kagum terhadap ulasan-ulasan Kyai Achmad saat mempresentasikan pandangannya di depan khalayak tentang berbagai hal, baik menyangkut soal keagamaan, dinamika sosial-politik, budaya, dan lain-lain. Jika dilihat dari sosok Kyai Achmad yang hanya jebolan pesantren salaf –dapat dilihat kembali pada biografi singkat pada sub bab sebelumnya--, namun Kyai Achmad dapat dibilang sebagai

<sup>20</sup> Niam & Nurhayati, "Pemikiran Kebangsaan", h. 249-250

<sup>21</sup> Baca Abdul Moqsih Ghazali, "Metodologi Islam Nusantara", dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, 2015), Cet. II, h. 109-110. Poin-poin penting menyangkut pandangan Kyai Achmad tentang hubungan Pancasila vis a vis Islam dapat dibaca secara detail pada Ni'am dan Nurhayati, "Pemikiran Kebangsaan", h. 249-256.



ulama/kyai yang dapat mewarnai aspek-aspek dinamis yang saat itu pesantren masih diposisikan oleh banyak orang sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang statis (tidak dinamis). Kyai Achmad seakan tampil mewakili pesantren untuk memberikan pencerahan bagi lainnya, sehingga pada masa-masa selanjutnya pesantren tidak lagi dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang *jumud*, statis, tradisional dan kolot.<sup>22</sup> Kultur inilah yang dikembangkan oleh Kyai Achmad dalam upaya mendobrak tatanan pesantren yang selama ini *stagnan* (cuek terhadap perubahan). Kemudian diikuti oleh generasi/santri NU berikutnya. Lebih-lebih ketika NU di bawah duet kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan K.H. Achmad Siddiq. Keduanya dianggap dua sejoli yang dapat mengikuti geliat perubahan zaman, sehingga perubahan yang digagas oleh keduanya, saat ini memberikan implikasi yang sangat signifikan bagi generasi NU dan masyarakat Indonesia, khususnya pandangan-pandangannya menyangkut hubungan agama dengan kenegaraan, kebangsaan, NKRI, dan Pancasila.<sup>23</sup>

Tipologi pemikiran responsif Kyai Achmad –sebagaimana katagorisasi Mujamil Qomar di atas— dapat ditunjukkan saat Indonesia dihadapkan pada problem kebangsaan dalam memilih ideologi untuk kehidupan bangsanya ke depan, Kyai Achmad memiliki pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan Islam adalah Agama. Ideologi pada umumnya diartikan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya. Tak ayal, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi, sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara berlebihan menganggap bahwa “ideologi

<sup>22</sup> Pandangan ini walaupun secara tidak langsung berasumsi bahwa Kyai Achmad sebagai pelopor dalam merubah tradisi Pesantren dari yang tradisional menuju modern, namun paling tidak setelah kepemimpinan NU pasca Kyai Achmad Siddiq (Ketika itu menjadi Ra'is Syuriah NU) dan K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur (menjadi Ketua Tanfidziyah NU), membawa implikasi dinamis terhadap perkembangan pemikiran di kalangan Pesantren. Bahkan ada yang berpendapat bahwa para intelektual muda NU yang sedemikian dinamis hingga saat ini, tidak dapat dilepaskan dari bangunan tradisi yang berhasil dirubah dan dikembangkan oleh Kyai Achmad Siddiq bersama Gus Dur tersebut. Walaupun tesis ini masih perlu kajian/penelitian lebih mendalam.

<sup>23</sup> Baca Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf*, (Jakarta: Erlangga Press, 2009), h. 172.

adalah agama”. Padahal bagaimanapun hebatnya ideologi yang dibangun, ia tetap hasil pemikiran manusia, dan tidak akan sampai ke derajat agama. Sedangkan Islam adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran Rasulullah SAW. Islam adalah *wadl’un Ilahiyun*, ciptaan Allah swt. Oleh karena itu, agama tidak boleh disetingkatkan dengan ideologi. Dengan kata lain, agama bukanlah ideologi. Namun Islam dapat –bahkan seharusnya— membimbing manusia merumuskan suatu ideologi yang benar. Islam dapat –dan seharusnya— menilai apakah suatu ideologi itu benar atau salah. Islam menolak ideologi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam, dan hanya dapat menerima ideologi yang sesuai, sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam.<sup>24</sup>

Masih pada argumentasi dalam menguatkan keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia hingga kini, Kyai Achmad dapat meyakinkan semua pihak dengan menyatakan, bahwa hal tersebut bukan sekedar taktik melainkan ada tiga alasan mendasar. *Pertama*, umat Islam Indonesia –melalui para pemimpinnya— ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (Piagam Jakarta), yang kemudian diterima dan disahkan dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. *Kedua*, secara substansial, nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. Misalnya, sila “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” mencerminkan pengertian *tauhid* (monoteisme murni) menurut akidah Islam (lihat QS. *al-Ikhlash*). Demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama –khususnya Islam. Bahkan urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka “*amanu wa ‘amilu al-shalihah*”.

---

<sup>24</sup> Lihat Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, h. 13. Baca juga pada Ni’am dkk., *Pancasila Vis a Vis Islam*, h. 83-84; Ni’am & Nurhayati, “Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq”, h. 250-251.

Kalaulah sila pertama dianggap sebagai pencerminan *amanu*, maka kiranya tidak keliru kalau empat sila berikutnya dapat dianggap mencerminkan *'amilu al-shalihah*. Ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya, negara Pancasila, akan membawa agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan dalam pembinaan hukum nasional.<sup>25</sup> Di sini tampak jelas bahwa Kyai Achmad sangat faham ajaran Islam dengan kondisi sosio-kultural dan politik yang melingkupi Indonesia. Kyai Achmad dapat disebut sebagai tokoh yang berfaham keagamaan universalis-kosmopolitanis, karena pemikiran-pemikirannya yang cenderung memberikan solusi atas berbagai problem yang muncul berbasis nilai-nilai dan prinsip agama Islam.

Kyai Achmad berpandangan, bahwa Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian, bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Kyai Achmad memberikan ilustrasi apik: “Sebuah ramuan, bisa saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap bumbu, tetapi kelima bumbu harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang”.<sup>26</sup> Pandangan kosmopolitan Kyai Achmad mengenai hubungan agama dan negara dapat dijadikan tidak hanya inspirasi tapi sekaligus aspirasi positif dari seorang tokoh ulama kharismatik NU dan Indonesia, yang masih *incontext* dengan zaman sekarang dan mendatang di Indonesia, di saat dunia Muslim lainnya—seperti di sebagian besar dunia Arab—tampak belum secara mapan menemukan bentuk negara *vis a vis* agama (Islam).

<sup>25</sup> Baca Ni'am dan Nurhayati, “Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq”, h. 251; Ni'am dkk., *Pancasila Vis a Vis Islam*, h. 84-85.

<sup>26</sup> Lihat Achmad Siddiq, “Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam”, *Makalah* yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an, h. 4.

## Bingkai Ukhuwwah dalam Menguhkan Nasionalisme

Seperti disinggung di depan, bahwa Kyai Achmad oleh Mujamil dikategorikan sebagai ulama yang memiliki tipologi pemikiran responsif terhadap berbagai persoalan kemummatan dan keagamaan.<sup>27</sup> Dalam setiap Gerakan pemikiran, senantiasa terkait dengan kondisi sosio-kultur yang melingkupinya –termasuk yang dialami oleh Kyai Achmad. Tentu problem dan isu yang berkembang akan berbeda beda. Walaupun demikian, setiap pemikiran, langkah dan gerakan yang dilakukan oleh para tokohnya –seperti Kyai Achmad— sudah dapat dipastikan membawa implikasi yang tidak kecil. Apalagi menyangkut faham kebangsaan (nasionalisme) yang senantiasa dinamis seiring dengan dinamika zaman. Muhammad A.S. Hikam menegaskan bahwa seorang intelektual sebagai salah satu elemen terpenting dalam *civil society* (masyarakat madani), dalam sejarahnya yang panjang akan memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan pemberdayaan (*empowerment*) dalam rangka menghadapi kekuatan negara. Di negara maju sekalipun, para intelektual dianggap sebagai pelopor bagi terwujudnya sebuah wilayah publik yang bebas (*a free public sphere*) yang akhirnya menjadi landasan bagi sebuah *civil society* yang mandiri.<sup>28</sup> Karena itulah pemikiran Kyai Achmad memiliki signifikansi jelas dan tidak akan pernah lekang ditelan zaman dalam pemberdayaan umat bagi pembentukan nasionalisme generasi penerus untuk masa-masa ke depan di Indonesia ini.

Ada beberapa tokoh yang dianggap memilikipengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan intelektualitas Kyai Achmad, sehingga ia menjadi tokoh bangsa yang diperhitungkan di Indonesia. Pada aspek pemikiran keagamaan, pendidikan, hubungan agama dan Negara, konsep pembangunan kebangsaan (*nation building*), sosial politik, dan budaya, Kyai Achmad banyak dipengaruhi oleh ayahandanya sendiri, K.H. Muhammad Siddiq, pamannya, K.H. Mahfudz Siddiq, dan juga K.H. A. Wahid Hasyim, Ir. Soekarno,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 171.

<sup>28</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi-LP3ES Indonesia, 1996), h. 196.

Bung Hatta, dan Syahrir.<sup>29</sup> Kemudian terkait dengan pemikiran dan gerakan spiritualnya, Kyai Achmad banyak dipengaruhi para tokoh ulama ternama seperti Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari, K.H. Abdul Hamid Pasuruan, K.H. Abdul Halim Siddiq, K.H. Achmad Qusyairi, dan K.H. Hamim Djazuli (Gus Miek).<sup>30</sup> Dari sinilah Kyai Achmad terbentuk pengetahuan dan kepribadiannya secara baik, sehingga ia tidak hanya *melek* (faham) soal keagamaan semata, namun juga mengerti soal-soal politik, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan sebagainya. Pada saatnya Kyai Achmad dapat disebut oleh banyak kalangan sebagai ulama intelektual organik, tidak hanya seorang ulama intelek yang mampu menggabungkan nilai-nilai dari tradisi lama yang dianggap baik untuk diselaraskan dengan nilai-nilai tradisi baru (modern) yang lebih baik, namun juga mampu meramu dan mendinamisasikan dengan perkembangan zaman.<sup>31</sup> Hal ini relevan dengan *adagium* yang selama ini dipegangi oleh kalangan Nahdliyyin (NU), yaitu menjaga dan melestarikan hal-hal lama yang dianggap baik dan mengambil hal-hal baru yang dianggap lebih baik dan bernilai masalah (*al-muhafadzatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*).

Gagasan segar Kyai Achmad menyangkut hubungan agama dan Pancasila adalah gagasan yang memiliki pengaruh kuat bagi perkembangan bangsa Indonesia hingga sekarang, sehingga Pancasila dapat diterima sebagai ideologi/dasar negara yang dianggapnya sudah final dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Di mana Pancasila tidak perlu lagi dipertentangkan dengan Islam, dan sudah dianggap final.<sup>32</sup> Keputusan tersebut walaupun dinyatakan Kyai Achmad pada tahun 1983 ketika Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo, yang

<sup>29</sup> Lihat dari "Pesantren sampai Presiden", dalam *Jawa Pos*, 24 Januari 1991; Kacung Marijan, "In Memorium: K.H. Achmad Siddiq", dalam *Surya*, 28 Januari 1991; Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS., *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta: Logos, 1999), Cet. I, h. 42.

<sup>30</sup> Baca Abdul Halim Soebahar, "Arsitek Pemikiran Islam Indonesia (Catatan Biografi K.H. Achmad Siddiq)", dalam *Penelitian*, (Jember: Tp., 2001), h. 21 & 35; Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, h. 36.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>32</sup> Anwar Hudijono, "K.H. Achmad Siddiq; Akar Menghujam-Batang Menjulung", dalam *Surya*, 25 Januari 1991; Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 177.

kemudian menjadi keputusan resmi NU dan diikuti oleh Ormas-ormas lainnya, namun implikasi *ijtihad*nya dapat dirasakan hingga saat ini, dan mungkin untuk masa-masa mendatang bagi dinamika kebangsaan Indonesia. Seiring dengan implikasi yang ditimbulkan, ada sebagian kelompok masyarakat yang masih mempersoalkan kembali tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* bangsa, untuk kembali kepada Piagam Jakarta. Dalam realitasnya keinginan untuk kembali kepada Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) oleh Sebagian kelompok tersebut, adalah ilusi dan tidak realistis dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia.<sup>33</sup>

Kyai Achmad menegaskan bahwa nilai-nilai dan prinsip yang ada pada Pancasila, dapat dielaborasi secara lebih konkrit ke dalam kosep *ukhuwwah* di dalam ajaran Islam. *Ukhuwwah Islamiyyah* tidak hanya terbatas pada umat Muslim saja, tapi mencakup *ukhuwwah wathaniyyah* dan *ukhuwwah basyariyyah*, karena sejak semula kedua *ukhuwwah* yang disebut terakhir itu telah tercakup dalam *ukhuwwah Islamiyyah* itu sendiri. Kyai Achmad melanjutkan, bahwa terma persaudaraan Islam (*ukhuwwah Islamiyyah*) tidak berarti persaudaraan yang bersifat eksklusif, persaudaraan yang terbatas pada umat Islam saja, akan tetapi persaudaraan yang memiliki arti lebih luas, yaitu persaudaraan yang meliputi orang ateis sekali pun selama mereka tidak berniat memusuhi umat Islam, masih dianggap sebagai saudara. *Ukhuwwah Islamiyyah* menurut Kyai Achmad adalah *ukhuwwah ‘ind al-Islam* (persaudaraan dalam versi Islam).<sup>34</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa *ukhuwwah Islamiyyah* memiliki cakupan yang luas sekali, berkarakter inklusif (terbuka), lintas agama, negara, ras, suku, budaya, etnis, dan sebagainya.<sup>35</sup> Konsep *ukhuwwah* yang digagas dan dikembangkan Kyai Achmad sebenarnya mengaleni segala bentuk skat-skat/Batasan-batasan primordialisme yang selama

<sup>33</sup> Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, h. 172-173.

<sup>34</sup> Mujamil, *NU "Liberal"*, h. 163; Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, h. 173; Syamsun Ni'am, *Belajar dari Buah Kedondong, Duren, dan Pisang*, (Malang: Edu Litera Press, 2020), h. 176-177.

<sup>35</sup> Andi Bahruddin Malik, "K.H. Achmad Siddiq (1926-1991): Sosok Ulama NU Liberal, Menjernihkan hubungan Pancasila dan Islam", dalam Rosehan Anwar dan Andi Bahruddin Malik, *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI., 2003), h. 249.

ini menjadi hambatan dalam membangun bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu sekaligus menegaskan bahwa merawat dan mengembangkan persaudaraan (*ukhuwwah*) dengan prinsip nasionalisme (cinta Tanah Air) merupakan sebuah kewajiban bagi siapapun yang hidup dalam wilayah NKRI ini. Secara spiritual, pandangan *genuine* Kyai Achmad jika ditarik ke belakang merupakan kontinuitas dari pandangan para tokoh sufi yang menyatakan, bahwa semua umat manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah swt., yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya.<sup>36</sup>

Pernyataan di atas juga menegaskan adanya penegasian terhadap anggapan bahwa hidup itu harus secara berkelompok dalam wadah organisasi Islam, juga menghilangkan anggapan bahwa orang Islam adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita ideologi Islam. Karena itu cita-cita Islam adalah berwawasan nasional dan global, tidak lagi berwawasan golongan dan sektarian. Kyai Achmad dalam kesempatan lain menyatakan: “*Ummat Islam adalah mereka yang bersahabat, percaya dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan Yang Maha Esa*”.<sup>37</sup> Kyai Achmad dikenal sebagai sosok yang telah berhasil mempertemukan kedua organisasi NU dan Muhammadiyah di saat keduanya memiliki hubungan yang kurang harmonis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Kyai Achmad Siddiq-lah yang berhasil mempersatukan kembali dua organisasi terbesar di Indonesia tersebut di saat ia memimpin organisasi NU, sehingga keduanya dapat bergandengan tangan hingga saat ini, walaupun masih saja ditemukan riak-riak kecil yang mengiringi persaudaraan (*ukhuwwah*) antar kedua organisasi NU dan Muhammadiyah tersebut. Bey Arifin dalam mengapresiasi langkah positif Kyai Achmad: “Beliau adalah ulama` besar, ‘alim, dan sulit dicari penggantinya. Kita semua tahu, sejak zaman Belanda, NU dan Muhammadiyah agak jauh. Tapi dengan kepemimpinan beliau, sekarang dua organisasi itu menjadi rapat dan baik”.<sup>38</sup> Jika saat ini hubungan antara NU dan Muhammadiyah menjadi harmonis,

<sup>36</sup> Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, h. 173.

<sup>37</sup> Lihat Noeh, *Menghidupkan Ruh*, h. 99-101.

<sup>38</sup> Bey Arifin, “Kesan-kesan Tokoh” dalam *Jawa Pos*, 24 Januari 1991.



maka peran signifikan Kyai Achmad menunjukkan hal tersebut.

Gayut bersambut, pandangan Kyai Achmad tentang pentingnya nilai-nilai “trilogi *ukhuwwah* (tiga fondasi persaudaraan) dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, menjadi inspirasi bagi generasi NU dan lainnya di masa-masa mendatang untuk terus menyemaikannya. Terbukti hingga kini penanaman nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda NU terus mengelora seiring dengan adanya gerakan de-nasionalisme oleh sebagian kalangan di Indonesia yang nota bene dilakukan oleh kelompok-kelompok trans-nasional, yang tidak faham dengan aspek kesejarahan terbentuknya NKRI ber-ideologi Pancasila secara utuh dan benar. Implikasinya, NU dalam setiap kesempatan seakan telah menjadi garda terdepan dalam membela dan mempertahankan dengan berbagai strategi dakwah kultural dan politiknya, di saat hampir sebagian besar kelompok baik organisasi massa maupun organisasi politik di negeri ini, telah ragu-ragu —jika mungkin terlalu hati-hati—, bahkan tidak berani secara tegas dan nyata dalam mendukung Pancasila. Oleh karena itu, di mata warga NU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD '45 —yang kemudian dipopulerkan oleh K.H. Maimoen Zubair (Mbah Moen) dengan istilah PBNU.

Pandangan Kyai Achmad Siddiq di atas, kemudian secara konsisten diteruskan oleh Mbah Moen dengan mengatakan: “Empat pilar itulah (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD '45) yang harus dijalankan oleh warga Nahdliyyin, ini yang harus diketahui, kalau orang NU nggak mau Pancasila, *yo ora patek* NU (ya nggak begitu NU)”. Mbah Moen melanjutkan, bahwa Islam merupakan agama yang melarang *ashabiyah* atau fanatisme kelompok. Mbah Moen mengajak ummat Islam untuk tetap menjunjung tinggi *ukhuwwah Islamiyah* atau persaudaraan sesama ummat Islam dan sesama warga bangsa yang diinspirasi nilai-nilai Islam”.<sup>39</sup> Pandangan Mbah Moen sinergis dengan konsep dasar Kyai Achmad dalam mengartikulasikan hubungan Pancasila dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan NKRI, ideologi Pancasila,

---

<sup>39</sup> Baca “Mbah Moen: Kalau NU Tidak Pancasila, Ya Bukan NU”, dalam *Liputan6.com* pada 26 Mei 2017, diakses tanggal 3 September 2017.



dan agama, bagi NU adalah final dan selalu mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia. Sudah tidak perlu lagi adanya pertentangan antara agama dan negara di Indonesia, tinggal bagaimana seluruh komponen bangsa ini dapat menjalankan yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa tersebut secara konsekuen, jujur, bertanggungjawab, dan adil.

## Penutup

Kyai Achmad merupakan sosok ulama kharismatik yang telah berhasil meletakkan fondasi bagi generasi setelahnya untuk lebih mencintai tanah airnya pada satu sisi, dan tidak meninggalkan agama Islam pada sisi lainnya. Kyai Achmad telah memberikan pandangan-pandangan krusial dalam menanamkan rasa nasionalisme hingga waktu yang tak terbatas, bagaimana Kyai Achmad dapat mempertemukan dua hal yang berbeda/kontras tentang hubungan agama dan negara secara luwes dan dinamis, sehingga NKRI dengan berlandaskan ideologi Pancasila semakin kokoh. Pandangan Kyai Achmad tidak hanya dilandasi oleh basis epistemeologis agama yang dianut, namun juga karena adanya pertimbangan sipiritual mendalam, kultural, dan historis yang sedemikian Panjang. Kyai Achmad adalah ulama intelek yang faham betul tentang kondisi bangsanya.

Pada saatnya nanti, gagasan cemerlang Kyai Achmad mengenai hubungan agama dan negara akan menjadi bahan kajian yang tiada pernah habis. Pada saat yang sama, akan dapat dilihat bahwa sosok Kyai Achmad sebagai ulama intelek jebolan pesantren, namun Kyai Achmad telah mampu mewarnai dan mendobrak tradisi pesantren yang selama ini dianggap statis, *jumud*, dan tradisional. Alhasil pada dinamika kehidupan berikutnya, pesantren dengan berbagai cap dan stempelnya, telah mengikuti ritme perkembangan zaman seiring dengan dinamika teknologi informasi yang sedemikian pesat. Saat ini pun dunia pesantren telah melakukan perubahan-perubahan ke arah tersebut.

*Wallahu a'lamu bi al-shawab!*

## Daftar Pustaka

- Abdussami, Humaidy dan Ridwan Fakla AS. (Ed.). 1995. *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama'*. Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, Cet. I.
- Arifin, Bey. "Kesan-kesan Tokoh". Dalam *Jawa Pos*, 24 Januari. 1991.
- "Dari Pesantren sampai Presiden". Dalam *Jawa Pos*, 24 Januari 1991.
- Ghazali, Abdul Moqsih. 2015. "Metodologi Islam Nusantara". Dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, Cet. II.
- Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi-LP3ES Indonesia.
- Huda, Afton Ilman. *Biografi Mbah Siddiq*. Jember: Pon. Pes. Al-Fattah, tt.
- Hudijono, Anwar. "K.H. Achmad Siddiq; Akar Menghujam-Batang Menjulung". Dalam *Surya*, 25 Januari 1991.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish. 2015. "Islam Indonesia Menatap Masa Depan: Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Waljama'ah". Dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, Cet. II.
- Malik, Andi Bahrudin. 2003. "K.H. Achmad Siddiq (1926-1991): Sosok Ulama NU Liberal, Menjernihkan hubungan Pancasila dan Islam". Dalam Rosehan Anwar dan Andi Bahrudin Malik. *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI.
- Mangkusasmito, Prawoto. 1970. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*. Jakarta: Hudaya.
- Marijan, Kacung. "In Memorium: K.H. Achmad Siddiq". Dalam *Surya*, 28 Januari 1991.

- ”Moen, Mbah: Kalau NU Tidak Pancasila, Ya Bukan NU”. Dalam *Liputan6.com* pada 26 Mei 2017. Diakses tanggal 3 September 2017.
- Ni’am, Syamsun. 2009. *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membeumikan Tasawuf*. Jakarta: Erlangga Press.
- Ni’am, Syamsun. 2020. “Re-Orientasi Kajian Islam dalam Mengurai Benang Kusut Kebhinnekaan di Indonesia”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Metodologi Studi Islam*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press.
- Ni’am, Syamsun. 2020. *Belajar dari Buah Kedondong, Duren, dan Pisang*. Malang: Edu Litera Press.
- Ni’am, Syamsun et.all. 2018. *Pancasila Vis a Vis Islam: Pandangan Tokoh uslim terhadap Upaya De-Ideologisasi Pancasila dan Implikasinya dalam Kehidupan Kebangsaan di Indonesia*. Yogyakarta & Tulungagung: Kurnia Kalam Semesta & IAIN Tulungagung Press.
- Ni’am, Syamsun & Anin Nurhayati. 2018. “Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya dalam Memantapkan Idiologi Pancasila sebagai Dasar Negera di Indonesia”. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*. Voume 23, No. 02 Juli-Desember.
- Ni’am, Syamsun & Anin Nurhayati. 2018. *Tasawuf Kebhinnekaan Perspektif Sufi Nusantara*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press.
- Noeh, Munawar Fuad dan Mastuki HS. (Ed.). 1999. *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. Jakarta: Logos, Cet. I.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nubowo, Andar. “Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi”. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 1, No. 1, 2015.
- Qomar, Mujamil, 2012. *Fajar Baru Islam Indonesia?Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.

- Qomar, Mujamil. 2002. *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Siddiq, K.H. Achmad. "Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam". *Makalah* yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an.
- Siddiq, K.H. Achmad. "Hubungan Agama dan Pancasila", dalam *Makalah untuk Pertemuan Ilmiah "Peranan Agama dalam Memantapkan Ideologi Negara"* yang Diselenggarakan oleh Balitbang Agama Departemen Agama RI. di Jakarta, 14-15 Maret 1985.
- "Siddiq, Kyai Achmad". Dalam *AULA: Risalah NU*. Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991. No. 02, Tahun XIII, h. 11
- Siroj, Said Aqil. 2014. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*. Jakarta: LTN NU.
- Sitompul, Einar M. 1989. *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soebahar, Abdul Halim. 2001. "Arsitek Pemikiran Islam Indonesia (Catatan Biografi K.H. Achmad Siddiq)". *Penelitian*. Jember: Tanpa Penerbit.
- Soekarno. 1961. "Lahirnya Pancasila". Dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*. Jakarta: DPA.
- Supriadi, Cecep. "Relasi Islam dan Negara: Wacana Islam dan Keindonesiaan", dalam *Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.